

PERKEMBANGAN TENAGA KERJA WANITA DI SEKTOR INFORMAL: HASIL ANALISA DAN PROXY DATA SENSUS PENDUDUK

Oleh
Lukmanul Hakim
Dosen STIE Totalwin Semarang

Abstract

This article analyses the trend of women workers in the informal sector in Indonesia over the last 20 years. The data shows that more and more women have entered the workforce and that the informal sector has the capacity to absorb the majority of the women workers. Data for the 1990s shows that the majority of women in the labour force were self-employed, and it is predicted that this is also will be the trend for women workers in the future. This self-employed trend is probably more attractive to women in the labour force because in this way they are more flexible in combining income-earning activities and their household chores.

Pendahuluan

Salah satu permasalahan pembangunan yang dihadapi bangsa Indonesia adalah masalah kependudukan. Masalah kependudukan yang harus mendapat perhatian serius antara lain (1) tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi, (2) jumlah penduduk yang besar, (3) struktur umur yang muda, dan (4) penyebaran penduduk yang tidak merata. Bila ditangani dengan tepat maka keadaan penduduk seperti di atas dapat menjadi elemen pembangunan yang penting. Di pihak lain, hal tersebut memungkinkan pula menjadi suatu tantangan berat bagi pembangunan.

Bila menengok kembali akan tujuan negara yakni untuk menghidupi rakyatnya dengan penghasilan yang layak maka permasalahan ketenagakerjaan juga merupakan salah satu aspek kependudukan yang perlu dikaji. Apalagi dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan Angkatan Kerja Muda. Selain Angkatan Kerja yang tumbuh cepat, masalah pokok ketenagakerjaan di Indonesia adalah bagaimana meningkatkan produktivitas.

Salah satu perkembangan sektor ketenagakerjaan yang perlu mendapat perhatian besar dalam pelaksanaan pembangunan adalah semakin pentingnya peranan Angkatan Kerja Wanita. Secara keseluruhan, tenaga kerja wanita di Indonesia menurut hasil Sensus Penduduk tahun 1980 mencapai sekitar 33 persen dari seluruh Angkatan Kerja yang bekerja secara aktif. Sedangkan pada tahun 1990 tenaga kerja wanita yang aktif menjadi 34,5 persen. Dengan demikian, ada sedikit kenaikan pertumbuhan tenaga kerja wanita selama periode tahun 1980 - 1990.

Pada umumnya wanita dipaksa untuk memilih dua keadaan yakni antara bekerja atau mengurus rumah tangga. Dibanding kaum pria, kaum wanita banyak

'dipekerjakan' hanya di lingkungan keluarga saja. Bagaimana dengan status wanita sekarang, dimana keadaan ekonomi menuntut tidak hanya kaum pria saja yang harus bekerja keras atau mencari nafkah?

Di dalam kesimpulan bukunya, Peter Hagul (1985) menyatakan bahwa studi kependudukan dan studi tentang status wanita mempunyai kaitan yang erat. Tidak heran dalam studi kependudukan bahwa penelitian tentang status dan peranan wanita semakin mendapat tempat.

Mengkaji Tabel 1 yang dikutip dari data Sensus Penduduk tahun 1971 hingga tahun 1990, di antara sektor pertanian, industri, dan jasa, terjadi penurunan persentase jumlah pekerja pada sektor pertanian sejak tahun 1971 hingga tahun 2000. Penurunan tersebut diimbangi dengan kenaikan proporsi penduduk yang bekerja di sektor industri dan pelayanan. Di antara kedua sektor tersebut ternyata peningkatan tenaga kerja wanita sektor industri lebih rendah dibanding sektor jasa. Pada tahun 2000 diperkirakan persentase tenaga kerja di sektor jasa masih lebih besar dibanding sektor industri.

Tabel 1. Persentase Penduduk Yang Bekerja Di Sektor Pertanian, Industri Dan Jasa Di Indonesia Pada Tahun 1971, 1980, 1990, Dan 2000

Sektor	1971	1980	1990	2000*)
Pertanian	65,9	54,2	50,4	45,5
Industri	12,5	13,3	20,6	25,5
Jasa	21,6	32,5	29,0	29,0
Jumlah ^{h)}	100,0	100,0	100,0	100,0

Keterangan: ^{h)} Tidak termasuk mereka yang lapangan pekerjaannya tidak jelas

^{*)} sebagai hasil Proyeksi berdasar rerata pertumbuhan periode sejak 1980-1990.

Sumber: Manning (1983) dengan perubahan; Biro Pusat Statistik (1991).

Makin menciutnya proporsi mereka yang bekerja di sektor pertanian dapat pula mempersempit kesempatan kerja bagi wanita. Sebelum teknologi pertanian berkembang seperti saat ini, dalam kegiatan pertanian tenaga kerja wanita masih banyak dimanfaatkan dalam bidang pertanian, mulai dari proses menanam sampai dengan pemanenan hasil pertanian. Namun, adanya perkembangan teknologi di bidang pertanian, tenaga kerja wanita nampaknya dapat tergeser. Terutama hal ini terasa di daerah pedesaan.

Adanya penciutan kesempatan kerja di sektor Pertanian di atas ternyata diikuti dengan membengkaknya kesempatan kerja di sektor lain, terutama sektor jasa. Pada sektor jasa, bukanlah hal yang asing lagi bagi wanita untuk memasuki bidang ketenagakerjaan. Bahkan pada sektor jasa, wanita lebih cepat untuk menekuni dan memperkembangkan karirnya. Nampaknya sektor jasa lebih fleksibel

bagi wanita, artinya selain untuk menambah pendapatan keluarga, fungsi sebagai ibu rumah tangga juga masih dapat dilakukan (Susilo, 1997).

Berdasarkan data Sensus Penduduk tahun 1971 hingga tahun 1990, ternyata sektor jasa memiliki persentase pekerja informal wanita lebih besar dibanding dengan sektor yang lain. Hal ini didukung terbukanya lebar-lebar kesempatan kerja bagi wanita di lapangan kerja perdagangan dan jasa kemasyarakatan. Dalam kondisi apapun, apalagi krisis moneter, sektor informal merupakan lapangan kerja yang lebih tangguh dalam menghadapi masalah ekonomi. Adanya fleksibilitas dalam bergiat di sektor informal, nampaknya wanita lebih sesuai bekerja di dalamnya. Fenomena inilah yang menarik bagi Penulis untuk mengkaji "trend" perkembangan wanita pekerja di sektor informal selama periode 1980 hingga 2000.

Partisipasi Angkatan Kerja Wanita

Menurut Duran (1975) yang dikutip oleh Bukit dan Bakir (1983), partisipasi wanita dalam angkatan kerja sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Akibatnya, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) wanita baik secara keseluruhan maupun berdasarkan kelompok umur sangat berbeda dari masa ke masa, dan antara negara/daerah yang satu dengan negara/daerah yang lain.

Perubahan dalam struktur ekonomi yang terjadi dalam proses pembangunan biasanya mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkat partisipasi wanita dalam angkatan kerja. Menurut Sinha (1965), dengan pembangunan perubahan dalam partisipasi wanita akan mengikuti pola yang berbentuk huruf "U". Pada tahap-tahap pertama dalam pembangunan, lapangan kerja di sektor pertanian dan sektor-sektor tradisional lainnya akan berkurang lebih cepat daripada peningkatan lapangan kerja di sektor modern. Diramalkan bahwa hal ini akan mengurangi kesempatan kerja dan meningkatkan pengangguran, terutama di kalangan wanita. Pada waktu yang bersamaan, proses pembangunan juga meningkatkan penghasilan keluarga sehingga mengurangi tekanan ekonomi yang sebelumnya memaksa wanita bekerja. Kedua hal ini menyebabkan wanita cenderung keluar dari angkatan kerja dan menyebabkan TPAK wanita menurun (Bukit dan Bakir, 1983).

Menurut Sinha, setelah pembangunan mencapai suatu tahap tertentu, pendidikan dan tingkat upah yang tinggi, dan kelangsungan untuk menikmati kemewahan hidup sebagai basil dari pembangunan telah mendorong wanita untuk kembali memasuki angkatan kerja. Hal ini meningkatkan TPAK wanita. Pendapat Sinha tersebut didukung oleh Rayappa (1974) dalam studinya mengenai perkembangan TPAK wanita di India, dan United Nations (1973) dalam studi perbandingan tentang TPAK wanita antara negara industri, semi industri dan negara agraris.

Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang pesat selama tahun 1971 dan 1980 telah merangsang kegiatan sektor pemerintahan dan sektor swasta secara meluas. Menurut Mayling Oey (1985), dalam Birokrasi Pemerintah telah terjadi pembengkakan tenaga kerja wanita yakni pada tahun 1971 kira-kira setengah juta pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang pemerintahan seperenamnya adalah

wanita. Pada tahun 1980, seperempat dari sekitar dua juta pegawai negeri sipil adalah wanita.

Ketertekanan dari kondisi ekonomi ternyata juga menyebabkan peningkatan terhadap TPAK wanita. Hal ini juga diungkapkan oleh Mayling Oey, bahwa kenaikan TPAK wanita adalah sungguh-sungguh akibat dari adanya bertambahnya kemiskinan. Keluarga-keluarga di desa, khususnya di Jawa, menghadapi kesulitan yang makin parah untuk memperoleh kesempatan mendapat penghasilan. Fenomena ini mendorong wanita bekerja di luar sektor pertanian sebagai upaya membantu penambahan penghasilan keluarga.

Pada tahun 1980 di sektor pertanian, wanita dominan bekerja sebagai pekerja keluarga sehingga mereka tidak menuntut untuk diupah; kondisi yang demikian ini disusul oleh buruh wanita. Permasalahan kemiskinan maupun tekanan kondisi ekonomi membuat mereka tidak betah bekerja di sektor pertanian, dan 'hijrah' ke kota untuk bekerja di sektor lain. Tentu saja hal ini mengubah pola status kerja pekerja wanita yakni justru semakin banyak yang bekerja dengan status kerja sebagai Buruh atau Karyawan. Pada saat yang sama, tenaga kerja Wanita yang berdomisili di desa didominasi oleh mereka yang berstatus kerja sebagai Pekerja Keluarga (Susilo, 1986). Kenyataan di atas juga dibuktikan oleh Manning (1983), berdasar hasil Sensus Penduduk 1980, nampak bahwa angkatan kerja wanita lebih banyak berpusat di sektor jasa baik di kota maupun di desa. Gejala tersebut terutama menonjol di daerah Jawa. Menurut Horn (1975) yang dikutip oleh Bukit dan Bakir (1983), mekanisasi sektor pertanian pedesaan di Jawa, antara lain penggunaan mesin penggilingan padi menggantikan metode penumbukan padi dengan tangan, telah menghilangkan lapangan kerja bagi ratusan ribu buruh tani wanita di desa-desa di Jawa. Hal ini semakin diperparah lagi dengan adanya penggunaan sistim tebasan untuk menggantikan cara-cara penuaian padi secara tradisional. Kebanyakan wanita yang kehilangan pekerjaan ini keluar dari desa dan mencoba peruntungannya di kota.

TPAK wanita di desa lebih tinggi daripada di kota. Rendahnya partisipasi wanita dalam angkatan kerja di kota tidak hanya disebabkan oleh masih terbatasnya lapangan kerja di sektor non-pertanian bagi wanita, tetapi juga karena sifat dan pekerjaan di kota yang umumnya mengharuskan wanita meninggalkan rumah. Hal ini menimbulkan konflik antara tugas wanita sebagai istri dan ibu rumah tangga di satu pihak, dan tugasnya sebagai seorang pekerja di pihak lain. Di pedesaan kebanyakan wanita bekerja di pertanian keluarga dan tidak perlu bekerja di luar lingkungan keluarga atau dalam lingkungan yang asing bagi suami mereka. Tugas rumah tangga juga dapat dilakukan bersama-sama dengan pekerjaan mereka (Bukit dan Bakir, 1983).

Secara teoritis, pendidikan bagi wanita akan meningkatkan penawaran dan permintaan terhadap tenaga kerja mereka. Menurut Boserup (1970) yang dikutip oleh Bukit dan Bakir, pendidikan akan memperbaiki status, kemampuan dan keahlian seorang wanita. Hal ini meingkatkan kemampuan bersaing dan meningkatkan

permintaan terhadap jasa jasanya di pasar tenaga kerja. Di samping itu, pendidikan juga meningkatkan aspirasi dan harapan seorang wanita tentang penghasilan dan kehidupan yang lebih baik, dan hal ini lebih mendorongnya untuk masuk angkatan kerja.

Lebih sibuknya wanita dalam mengurus rumah tangga, pada gilirannya berpengaruh pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yakni TPAK laki-laki lebih tinggi dibanding TPAK wanita. Peranan wanita nampaknya masih bertumpu sebagai ibu rumah tangga yang ideal bagi keluarganya. Sebaliknya, ikutnya wanita dalam partisipasi angkatan kerja terkait dengan kondisi tekanan ekonomi rumah tangga yakni ingin membantu dalam meningkatkan pendapatan keluarga, atau juga karena kegiatan rumah tangga (misalnya mengurus anak) sudah dapat ditinggalkan. Selain itu, adanya kemajuan di bidang pendidikan sehingga membuka cakrawala pandang kaum wanita juga sebagai faktor yang tidak dapat ditinggalkan.

Sebagai wanita Indonesia, ternyata tidak sedikit yang merangkap selain sebagai ibu rumah tangga ideal, mereka juga sebagai perkerja yang aktif guna menambah pendapatan keluarga. Apalagi dalam kondisi krisis sosial ekonomi yang dirasakan berkepanjangan. Berkaitan dengan itu, sektor informal sebagai jawaban dilema bagi kaum Kartini seperti di atas (Soesilo, 1997).

Pekerja Wanita dan Sektor Informal

Salah satu segi keuntungan menggunakan data Sensus Penduduk selain kevalidan datanya adalah juga dapat dipergunakan untuk mem-proxy (pendekatan) sektor informal. Hal ini dapat didekati dengan memakai klasifikasi Status Pekerjaan yang dipakai dalam sensus penduduk. Menurut Widarti yang dikutip oleh Bakir dan Manning (1983) bahwa berdasarkan data hasil sensus penduduk 1971, mereka yang bekerja sebagai Pekerja Sendiri, dan Pekerja Keluarga dapat digolongkan ke dalam sektor informal. Pada Sensus Penduduk 1980 dan 1990 terjadi sedikit perubahan dalam pengelompokan Status Pekerjaan, sehingga yang termasuk sektor Informal terdiri dari mereka yang bekerja sendiri, berusaha dengan menggunakan buruh tidak tetap, dan pekerja keluarga.

Dibanding sektor formal, jumlah tenaga kerja produktif di sektor informal lebih besar. Jumlah tenaga kerja di sektor informal ternyata 4 kali lebih besar dibanding di sektor formal yakni 43,9 juta orang dibanding 13,9 juta orang. Namun, pada kawasan kota memiliki jumlah sektor informal yang lebih kecil dibanding di pedesaan (lihat tabel 2). Dengan demikian, sektor lebih mampu menampung tenaga kerja dibanding sektor formal, khususnya sektor informal di pedesaan. Sektor informal selain lebih fleksibel juga mempunyai kemampuan yang 'survive' yang tinggi dalam menghadapi kondisi tekanan ekonomi apapun. Oleh karena itu, di sektor informal wanita nampaknya lebih sesuai dalam melaksanakan perannya selain sebagai ibu rumah tangga juga mampu untuk aktif giat dalam kegiatan ekonomi.

Tabel 2. Jumlah Tenaga Kerja Produktif di Sektor Formal dan Informal Tahun 1995

Kawasan	Sektor Formal (Juta)	Sektor Informal (Juta)	Jumlah (Juta)
Pedesaan	7,877 (16,72%)	39,224 (28,28%)	47,107 (100%)
Kota	6,037 (54,41%)	4,665 (45,59%)	10,702 (100%)
JUmlah	13,914 (24,07%)	43,889 (75,93%)	75,803 (100%)

Sumber: BPS, 1996; Tagela, U. 1999

Pekerja informal wanita di sektor jasa memiliki proporsi yang lebih besar dibandingkan dengan sektor yang lain (Pertanian, dan Industri). Pada Tabel 3, mengungkapkan bahwa selama tahun 1980 dan 1990 jumlah pekerja informal wanita di sektor jasa lebih tinggi dibanding dengan sektor pertanian dan industri. Bahkan jumlah pekerja informal wanita pada tahun 1990 sebanyak 2,1 juta lebih; sedangkan di sektor pertanian dan industri berturut-turut sebanyak 0,17 juta orang dan 0,18 juta orang. Proporsi pertambahan pekerja informal yang tertinggi di sektor jasa ternyata berasal dari lapangan kerja perdagangan, dan jasa kemasyarakatan. Rata-rata pertumbuhan pekerja informal di lapangan kerja perdagangan adalah tertinggi dibanding kedua lapangan kerja lain di sektor jasa.

Tabel 3. Pertumbuhan wanita pekerja informal menurut sektor di kota tahun 1980 – 1990

Sektor	Jml. Wanita Pekerja Informal		Pertumbuhan (%/thn)
	1980	1990	
Pertanian	118.700	170.600	8,2
Industri	124.100	178.200	3,6
Jasa	1186.000	2143.400	5,9
a. Perdagangan	884.300	1794.600	7,1
b. Keuangan	1.400	2.800	6,9
c. Jasa Kemasyarakatan	300.300	346.000	1,4

Sumber: BPS, Sensus Penduduk 1980, dan 1990 seri S nomor 2.

Pola yang sama diduga akan terjadi pada tahun 2000-an, yakni wanita pekerja di sektor informal lebih banyak mendominasi pada sektor jasa, khususnya di lapangan kerja perdagangan. Dalam kondisi krisis moneter yang berkepanjangan, sektor informal khususnya lapangan kerja perdagangan mampu lebih banyak memberikan kesempatan wanita untuk berkiprah di dunia kerja. Di sektor informal pada lapangan kerja perdagangan tersebut wanita tanpa berpendidikan tinggipun dapat dengan mudah melaksanakannya. Menurut Supriadi (KOMPAS, 7 Nov. 2000), hampir 32 % perempuan Indonesia tidak sekolah dan hanya 13 % yang lulus SLTP yang memasuki dunia kerja. Bahkan, pertumbuhan wanita pekerja sektor informal pada tahun 2000-an di lapangan kerja perdagangan

akan melaju lebih pesat dibanding di sektor dan lapangan kerja yang lainnya.

Menurut Squire (1981) bahwa *apabila jumlah penduduk meningkat dengan cepat, maka kelompok sektor Jasa seringkali dianggap sumber kesempatan kerja residual*. Adapula yang berpendapat bahwa sektor informal meningkat sesuai dengan besar kota; semakin beragam kegiatan dan kelengkapan berbagai sarana maupun prasarana kota maka semakin banyak pula penduduknya yang bekerja sebagai pekerja informal. Lengkapnya berbagai fasilitas perkotaan merupakan daya tarik bagi penduduk pedesaan (termasuk wanita) untuk mengadu nasibnya di kota.

Sebagai warga pedesaan ternyata tidak sedikit penduduk desa yang mencari nafkah sebagai pekerja informal di kota. Di kota mereka bekerja sebagai penjual makanan, pengamen, pembantu rumah tangga dan sebagainya. Kondisi inilah yang berpengaruh terhadap tingginya pertumbuhan sektor informal di kota.

Berkaitan dengan itu, menurut Mantra (Manning, 1983), bahwa banyak di antara pekerja informal ini yang merupakan penglaju tetap dan migran sirkuler yang masih terdaftar sebagai wanita desa. Di pihak lain, berdasar data Tabel 3 di atas ternyata membuktikan bahwa tergesernya tenaga kerja wanita di sektor pertanian sebagai akibat perkembangan teknologi pertanian, yang menyebabkan mereka terpaksa beralih bekerja pada sektor jasa. Hal ini menyebabkan pekerja wanita di sektor jasa tersebut menjadi 'menggelembung'.

Dapat dimungkinkan pula bahwa pada periode mendatang pekerja informal wanita di lapangan kerja Perdagangan dan Jasa akan memiliki proporsi yang sama. Sektor informal di lapangan kerja Jasa nampaknya mempunyai prospek yang baik, selain di perdagangan. Oleh karena itu, tidak mustahil bahwa kedua lapangan kerja di atas dianggap sebagai tumpuan harapan terbukanya kesempatan kerja bagi wanita.

Hal lain yang perlu dipikirkan secara mendalam oleh kaum wanita adalah situasi yang bagaimana dalam keluarga sehingga wanita dapat terjun ke bidang tenaga kerja? Tentu kalau keluarga masih banyak memerlukan pelayanan dari ibu rumah tangga - anak-anak masih perlu pengawasan dan bimbingan dari orang tua - maka wanita sulit untuk melepaskan tanggung jawabnya pada keluarga. Sebaliknya, ketika anak-anak sudah menginjak dewasa, mungkin pula wanita dapat menekuni profesi dalam kegiatan ekonomi sambil melayani keluarga. Dalam kondisi yang demikian pada umumnya dapat memeras tenaga kerja wanita baik secara fisik maupun pikiran. Melalui 'sentuhan' tangan wanita sebagai perwujudan harkat dan martabatnya, nampaknya bangsa kita dapat meraih kesejahteraan dimulai dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, aspirasi kaum wanita yang positif harus dapat diwujudkan.

Wanita Pengusaha dan Buruh

Berbeda halnya dengan pola yang terjadi pada sektor pertanian dan industri; hampir semua macam status pekerjaan pada sektor jasa mengalami kenaikan proporsi. Hanya proporsi mereka yang bekerja sebagai buruh atau karyawan yang mengalami penurunan. Kenaikan proporsi yang besar pada mereka yang berstatuskan

di luar buruh mengakibatkan terjadinya penurunan pada proporsi buruh atau karyawan. Penurunan proporsi ini bukan berarti bahwa jumlah absolut mereka yang bekerja sebagai buruh (karyawan) juga terjadi penurunan.

Tabel 4. Distribusi Persentase Pekerja Wanita di Sektor Jasa menurut Status, dan Lapangan Pekerjaan, Tahun 1990

Status Pekerjaan	Lapangan Kerja			Sektor Jasa*)
	Perdagangan	Keuangan	Jasa Kemasyarakatan	
Pengusaha tanpa buruh	42,5	1,3	13,6	30,2
Pengusaha dengan buruh tidak tetap	28,9	0,5	2,7	17,9
Pengusaha dengan buruh	1,1	0,8	0,9	1,0
Buruh/Karyawan	9,4	96,9	78,0	38,4
Pekerja Keluarga	18,1	0,5	4,9	15,5
Total	100,0	100,0	100,0	100,0

Keterangan: *) Total dari lapangan kerja perdagangan, keuangan dan jasa.

Sumber: BPS. Sensus Penduduk 1990, seri S nomor 2.

Pada tahun 1990 wanita pekerja sebagai pengusaha sendiri (tanpa buruh) proporsinya lebih dominan dibanding dengan pengusaha dengan buruh yakni 30,2 persen dibanding 1,0 persen. Wanita pengusaha tanpa buruh banyak dilakukan di lapangan kerja perdagangan. Pada lapangan kerja keuangan, dan jasa kemasyarakatan, ternyata wanita lebih dominan sebagai buruh atau karyawan. Sedangkan wanita pekerja dengan proporsi tertinggi pada sektor jasa berturut-turut adalah buruh (karyawan), disusul oleh proporsi para pengusaha wanita tanpa buruh, masing-masing sebesar 38,4 persen dan 30,2 persen.

Di pihak lain, adalah wajar jika proporsi wanita pekerja keluarga relatif kecil, karena dalam kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan menyulitkan setiap keluarga untuk menciptakan lapangan kerja sendiri. Meskipun selain menginginkan sebagai ibu rumah tangga yang ideal, kaum wanita juga ingin bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Mereka lebih 'menikmati' pekerjaan tersebut (pekerja keluarga) khususnya di lapangan kerja perdagangan.

Bila pada tahun: 2000-an krisis ekonomi tetap berkepanjangan, maka kondisi ini dapat menekan pertumbuhan wanita pekerja sebagai buruh (karyawan) sehingga lamban pertumbuhannya. Sebaliknya hal tersebut mendorong para wanita pekerja sebagai pengusaha tanpa buruh akan bertumbuh dengan cepat. Dalam pekerjaan dengan status tersebut nampaknya wanita lebih mandiri dan relatif mudah menguasainya; khususnya hal ini terjadi pada lapangan kerja perdagangan.

Kita perlu memuji dan mengacungkan jempol bila melihat tingginya proporsi wanita sebagai pengusaha yang memakai buruh. Sebagai pengusaha dengan bantuan buruh tentu saja akan membuka kesempatan kerja bagi para pengangguran.

Sepak terjang kaum wanita pengusaha dengan buruh ini tidak kecil sumbangannya terhadap pembangunan. Cukup beruntung bagi negeri kita bila banyak wanita yang dapat berbuat demikian karena ada kesempatan untuk 'Srikandi' Indonesia dalam meningkatkan karir.

Menurut Hariadi (1990), dalam penelitiannya di daerah Sumberagung dan Donokerto, menunjukkan adanya kegotong-royongan dan kebersamaan para pekerja wanita di bidang pertanian yang cukup tinggi. Bahkan dalam kerjasama antar petani tersebut, ada petani lapisan atas (menguasai lahan sawah di atas 0,5 Hektar) tidak segan-segan ikut membantu sebagai pekerja (buruh) pada lapisan bawah (menguasai lahan sawah kurang dari 0,5 Hektar) dan diupah, sebab bila petani tidak ikut membantu sebagai pekerja di sawah tetangganya maka ia sendiri akan kesulitan mendapatkan pekerja bila sewaktu-waktu memerlukan. Tolong menolong ini sebenarnya merupakan prinsip tukar-menukar tenaga kerja meskipun sudah dinilai dengan uang. Sayangnya, sifat kegotong-royongan tersebut jarang terjadi sektor jasa, apalagi di perkotaan.

Selama tahun 1990, proporsi wanita pengusaha dengan memakai buruh berturut-turut yang tertinggi adalah pada lapangan kerja perdagangan dan jasa kemasyarakatan, serta yang terakhir pada lapangan kerja keuangan. Sedangkan proporsi pengusaha tanpa buruh di perdagangan - secara absolut adalah tertinggi - adalah yang terbesar dibanding dengan status pekerjaan maupun lapangan kerja yang lain.

Persentase wanita pekerja yang sebagai buruh pada sektor jasa ternyata tertinggi; begitu pula yang terjadi pada lapangan kerja keuangan, mereka yang bekerja sebagai buruh memiliki persentase tertinggi juga. Tingginya angka tersebut mungkin disebabkan bahwa lapangan kerja keuangan yang umumnya bersifat formal membutuhkan pelayanan yang bersifat 'luwes' dan menarik. Dalam hal ini, wanita lebih luwes pelayanannya dibanding dengan kaum pria.

Buruh wanita yang bekerja di perdagangan persentasenya relatif kecil yakni sebesar 9,4 persen. Mungkin dengan banyaknya keberhasilan para wanita pengusaha, baik yang menggunakan buruh maupun yang tidak, akan menarik perhatian wanita lain untuk menjadi pengusaha dari pada menjadi buruh. Selain itu, akibat dari pendapat bahwa masa depan buruh atau karyawan akan kurang cerah dibanding dengan status pekerjaan yang lain.

Beberapa masalah-masalah umum yang dihadapi oleh buruh wanita adalah bahwa mereka berpendidikan rendah, tidak punya ketrampilan khusus, produktivitas kerja relatif rendah dan upah mereka rendah. Adanya aksesibilitas dan kesempatan di bidang pendidikan yang semakin tinggi diharapkan dapat mengubah kondisi umum tersebut.

Rata-rata pertumbuhan wanita pekerja keluarga di sektor jasa tiap tahunnya juga relatif tinggi terutama pada lapangan kerja jasa kemasyarakatan. Mungkin pula hal ini ada kaitannya dengan tingginya pertumbuhan wanita pengusaha terutama pengusaha dengan bantuan anggota rumah tangga atau buruh tidak tetap.

Penutup

Pekerja informal pada sektor jasa juga memiliki rata-rata pertumbuhan yang relatif tinggi. Selama tahun 1990, sektor informal telah membuka yang bekerja, maka sektor informal untuk saat ini merupakan harapan yang baik untuk tumpuan bagi para wanita. Bahkan, hal ini akan tetap terjadi pada tahun 2000-an, karena adanya fleksibilitas jam dan tempat kerja pada sektor informal memungkinkan wanita melakukan sekaligus dua kegiatan yakni mengurus rumah tangga, dan menambah pendapatan rumah tangga. Selain itu, pada sektor informal tersebut tidak membutuhkan persyaratan latar belakang pendidikan yang tinggi.

Di antara kelima macam status pekerjaan yang dipakai dalam perbandingan, ternyata buruh (karyawan) wanita lebih dominan dalam setiap lapangan kerja, kecuali pada lapangan kerja perdagangan. Kondisi tersebut diikuti oleh besarnya proporsi wanita pekerja dengan status pengusaha tanpa buruh. Sedangkan yang terkecil adalah pengusaha dengan buruh.

Dalam kondisi tekanan ekonomi yang berkepanjangan (misalnya krisis moneter) maka dapat diprediksi bahwa pada tahun 2000-an nanti pertumbuhan wanita pekerja sebagai buruh akan lamban pertumbuhannya. Sebaliknya, wanita pekerja sebagai pengusaha tanpa buruh mempunyai pertumbuhan yang relatif cepat, khususnya di lapangan kerja perdagangan.

Fenomena tentang perkembangan ketenagakerjaan wanita di sektor informal telah membuktikan bahwa sektor informal dapat mengatasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia yang berarti dapat mengatasi masalah pengangguran. Namun demikian, dalam menanggapi pertumbuhan sektor informal diperlukan sikap yang bijaksana. Pembinaan dan bantuan (modal) dari pemerintah sangatlah diperlukan agar mereka dapat berkembang dengan tingkat produktivitas yang meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 1996. *Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat oleh Perguruan Tinggi*. Jakarta: Depdikbud. Dirjendikti. Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.
- Bakir, Z dan Manning, Chris. 1983. *Partisipasi Angkatan Kerja, Kesempatan Kerja dan Pengangguran di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan, Universitas Gadjah Mada.
- Biro Pusat Statistik. 1982. *Penduduk Indonesia Hasil Sampel Sensus Penduduk 1980*. Jakarta, seri S, No. I
- , 1984 a. *Analisa Ringkas Hasil Sensus Penduduk 1980*. Jakarta.

- , 1984 b. *Analisa Ketengakerjaan Di Indonesia berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 1971- 1980. Vol. 1.* Jakarta.
- , 1987. *Hasil Survei Penduduk Antar Sensus 1985.* Seri SUPAS No. 5.
- , 1991. *Sensus Penduduk Indonesia: Penduduk Indonesia.* Seri S No. 2. Jakarta
- Boserup, E. 1970. *Women's role in economic development.* New York: St. Martin's Press.
- Bukit, D, dan Bakir, Z. 1983. *Partisipasi Angkatan Kerja Indonesia: Hasil sensus Penduduk 1971 dan 1980* dalam Partisipasi angkatan kerja, Kesempatan Kerja dan Pengangguran di Indonesia. Zainab Bakir dan Criss Manning (Ed.) Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Studi kependudukan, Universitas Gadjah Mada.
- Diah Widarti. 1983. *Hubungan antara Sektor S dan Sektor Informal di Kota,* dalam buku Partisipasi Angkatan Kerja, Kesempatan Kerja dan Pengangguran di Indonesia. Zainab Bakir dan Criss Manning (Ed.) Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan, Universitas Gadjah Mada.
- Durand, John D. 1975. *The Labor force in economic development: a comparison of International Census Data 1946-1966.* New Jersey: Princeton University Press.
- Fouad, NA, Kammer, PP. 1989. Work Values of Women with Differing Sex-Role Orientations. dalam JOURNAL OF CAREER DEVELOPMENT. Vol. 15, Number 3, Spring 1989.
- Hariadi, SS. 1990. *Wanita, Kerja dan Rumah Tangga.* Pengaruh Pembangunan Pertanian terhadap Peran Wanita Pedesaan di daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: Pusat Peneltian Kependudukan UGM.
- Horn, Marjorie C. 1975. "Women's employment in Indonesia" *dalam Urbanization in developing countries.* Washington D.C.: World Bank Publication No. P11.2220.
- Hagul, Peter. 1985. *Penelitian tentang kependudukan dan Status Wanita di Indonesia.* Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada.
- Kasto. 1984. *Geografi Penduduk dan Masalah Kependudukan di Indonesia.*

Yogyakarta: Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada.

- Koentjaraningrat. 1986. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia.
- Liakip. 1983. *Penyerapan Tenaga Kerja dalam Sektor Pertanian di Indonesia Tahun 1971 - 1980*. Tesis Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Maeyling Oey. 1985. *Perubahan Pola Kerja Kaum Wanita di Indonesia Selama Dasawarsa 1970. Sebab dan Akibatnya*. dalam PRISMA Menegakkan Peran Ganda Wanita Indoneisa. Vol. 10: LP3ERS.
- Mc Donald, Peter F. 1983. *Pedoman Analisa Data Sensus Penduduk 1971 - 1980*. Canberra, The Australian Vice-Chancellors Comttee Australian Universities International Development Program.
- Manning, Chris. 1982. *Kegiatan ekonomi angkatan kerja di Indonesia: sebuah pengantar analisa dan interpretasi data sensus*. Yogyakarta: PPSK UGM.
- Mantra, LB. 1980. *Population in wet rice communities*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rayappa, H.P. 1974. *Determinats of labor force participation in a developing economy: an analysis for India*. (Ph.D. dissertation, Tsallahassee, Florida State University).
- Sinha, J.N. 1965. *Dvnamics of female partisipation in economic activity in developing economy*. Belgrade. Proceedings of the World Population Conference IV.
- Sitisoemandiri Soeroto. 1982. *Kartini Sebuah Biografi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Soetrisno, Loekman. 1997. *Kemiskinan, Perempuan Dan Pemberdayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Soesilo, T Danny. 1986. *Karakteristik Tenaga Kerja Wanita di Sektor Jasa: Analisa Data sensus Penduduk Tahun 1971 - 1980*. Yogyakarta: Fak. Geografi UGM
- , 1988, *Wanita harus Berani Bersaing*, dalam Majalah FKIP (Sekarang Satya Widya). Salatiga: FKIP UKSW.
- , 1997. *Sektor Informal, Jawaban Dilema Kaum Kartini?* Jakarta: KOMPAS 21 April.

- Squire, L. 1981. *Employment policy in developing countries: a survey of issues and evidence*. Kuala Lumpur: World bank, Oxford University Press
- Supriadi, Yusuf. Mutu Perempuan Terendah di ASEAN, dalam KOMPAS. 7 November 2000.
- Tagela, U. 1999. *Diskrepansi antara Lulusan Pendidikan dengan Pengangguran Terdidik*. Salatiga: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependidikan FKIP UKSW.